

ANALISIS KONFLIK BUDAYA POLITIK DI PAPUA: PERSPEKTIF POLITIK MULTIKULTURALISME DAN KONFLIK POLITIK IDENTITAS

SUHARIZAL

Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas
suharizal.hukum@gmail.com

Abstract: *The Papua region has a rich culture and unique customs that differentiate it from other regions in Indonesia. However, the implementation of development policies by the central government often gives rise to polemics, especially when local needs and identities are not accommodated. This article aims to analyze development policy conflicts in Papua from a multicultural political perspective. Using a qualitative analysis approach, the discussion includes the dominance of majority identity, social exclusion, recognition of local identity, inclusive policies, and the conflict between national principles and local autonomy. The conclusion shows that development in Papua requires policies that are inclusive, respect local identity, and involve the active participation of local communities. A multicultural approach can be a solution in creating harmony between national development and local cultural diversity.*

Keywords: *Conflict, Political Culture, Papua.*

Abstrak: Wilayah Papua memiliki kekayaan budaya dan keunikan adat istiadat yang membedakannya dari wilayah lain di Indonesia. Namun, penerapan kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat sering kali menimbulkan polemik, terutama ketika kebutuhan dan identitas lokal tidak diakomodasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konflik kebijakan pembangunan di Papua dalam perspektif politik multikultural. Dengan pendekatan analisis kualitatif, pembahasan meliputi dominasi identitas mayoritas, eksklusi sosial, pengakuan identitas lokal, kebijakan inklusif, dan konflik antara prinsip nasional dan otonomi lokal. Kesimpulan menunjukkan bahwa pembangunan di Papua memerlukan kebijakan yang inklusif, menghormati identitas lokal, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Pendekatan multikultural dapat menjadi solusi dalam menciptakan harmoni antara pembangunan nasional dan keberagaman budaya lokal.

Kata Kunci: Konflik, Budaya Politik, Papua.

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keberagaman budaya yang luar biasa, menghadapi tantangan besar dalam mengelola hubungan pusat-daerah, terutama di wilayah yang kaya sumber daya alam seperti Papua. Upaya desentralisasi, yang dimulai setelah era Orde Baru, awalnya bertujuan untuk memberdayakan daerah dan merespons ketidakpuasan yang mengakar dalam sejarah (Andi, 2007). Namun, implementasinya di Papua sering kali memperparah konflik budaya politik yang kompleks, terutama dalam konteks politik multikulturalisme.

Papua, sebagai wilayah yang kaya akan budaya dan sumber daya alam memiliki keunikan tersendiri dalam konteks pembangunan nasional Indonesia. Karakteristik masyarakat adat Papua, dengan adat istiadat dan nilai-nilai lokalnya, sering kali berbeda dengan pendekatan pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana pemerintah mengelola keberagaman ini tanpa mengabaikan identitas lokal dan kebutuhan masyarakat adat (Yappika, 2001).

Sejak diberlakukannya Otonomi Khusus Papua (Otsus) pada tahun 2001, pemerintah pusat berupaya memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat Papua untuk

menentukan arah pembangunannya sendiri. Namun, implementasi kebijakan ini sering diwarnai konflik, baik dalam bentuk resistensi masyarakat lokal terhadap proyek-proyek nasional maupun ketegangan antara nilai-nilai lokal dan prinsip nasional. Dalam banyak kasus, kebijakan pembangunan justru meminggirkan masyarakat adat dari tanah leluhur mereka, menciptakan eksklusi sosial, dan menimbulkan resistensi terhadap pemerintah (Anugerah, 2019).

B. Metodologi Penelitian

Politik multikultural menawarkan pendekatan yang relevan dalam mengelola keberagaman ini. Dengan prinsip pengakuan (*recognition*), inklusi, dan penghormatan terhadap identitas lokal, politik multikultural menekankan pentingnya kebijakan pembangunan yang adil dan partisipatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis polemik pembangunan di Papua dalam perspektif politik multikultural, dengan fokus pada aspek dominasi identitas mayoritas, eksklusi sosial, pengakuan identitas lokal, kebijakan inklusif, dan konflik antara prinsip nasional dan otonomi lokal (Robert A. 1985).

C. Hasil dan Pembahasan

Dominasi Identitas Mayoritas. Pemerintah pusat sering kali menggunakan pendekatan pembangunan berbasis perspektif nasional yang tidak selalu relevan dengan kondisi lokal Papua. Proyek infrastruktur besar seperti jalan dan tambang sering mengabaikan nilai-nilai adat dan lingkungan lokal. Keberadaan militer yang signifikan di Papua, yang dimaksudkan untuk menjaga keamanan, sering kali memperburuk ketidakpercayaan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat. Pendekatan militeristik yang dominan dianggap sebagai respons represif terhadap ketegangan politik dan sosial di wilayah tersebut, namun, hal ini justru menciptakan lingkungan yang penuh dengan rasa takut dan kecemasan bagi masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, operasi militer yang dilakukan sering kali dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, seperti intimidasi, penangkapan tanpa proses hukum yang jelas, dan bahkan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Hal ini semakin memperkuat persepsi masyarakat Papua bahwa pemerintah pusat tidak benar-benar memahami atau menghormati identitas dan kebutuhan mereka.

Pendekatan seperti ini tidak hanya gagal menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar politik multikulturalisme yang menekankan penghormatan terhadap keberagaman, dialog, dan rekonsiliasi. Dalam konteks politik multikultural, konflik harus diselesaikan melalui jalur damai yang melibatkan partisipasi aktif semua pihak, termasuk masyarakat adat. Namun, keberadaan militer sering kali membatasi ruang bagi dialog dan menciptakan jarak antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan erosi kepercayaan, baik terhadap institusi negara maupun terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan harmoni multikultural di wilayah tersebut.

Sebagai solusi, pendekatan yang lebih inklusif dan humanis diperlukan untuk mengatasi masalah keamanan di Papua. Pemerintah seharusnya menggantikan kebijakan sekuritisasi dengan pendekatan berbasis pembangunan dan dialog sosial. Penempatan militer di wilayah tersebut harus dikurangi secara bertahap, dengan fokus pada pelibatan masyarakat sipil dalam menjaga stabilitas. Selain itu, pemerintah perlu menginvestasikan sumber daya dalam program-program yang mempromosikan pendidikan multikultural, rekonsiliasi, dan pembangunan berkelanjutan untuk menjawab akar permasalahan sosial-ekonomi yang menjadi penyebab utama ketegangan di Papua. Dengan pendekatan ini, harmoni sosial dan keberlanjutan pembangunan dapat tercapai tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip multikulturalisme. Politik multikultural menolak dominasi identitas

mayoritas dalam kebijakan publik. Pendekatan pembangunan berbasis perspektif nasional tanpa memperhatikan nilai-nilai lokal Papua melanggar prinsip pengakuan atas identitas budaya unik.

Eksklusi Sosial terhadap Minoritas Lokal. Proyek nasional seperti pertambangan dan perkebunan sering kali melibatkan pengambilalihan lahan masyarakat adat tanpa persetujuan yang memadai. Hal ini mengakibatkan hilangnya akses masyarakat lokal terhadap tanah dan sumber daya yang menjadi basis kehidupan mereka. Papua kaya akan sumber daya alam, termasuk hutan, tambang, dan minyak. Namun, eksploitasi sumber daya ini sering kali tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal. Sebaliknya, mereka justru menghadapi dislokasi sosial, degradasi lingkungan, dan marginalisasi ekonomi. Dalam konteks multikulturalisme, kebijakan pembangunan harus dirancang untuk memberdayakan masyarakat adat, bukan mengeksploitasi mereka. Program seperti Kehutanan Masyarakat bertujuan untuk melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, implementasi yang lemah dan kurangnya kapasitas pemerintah daerah membuat program ini gagal menyelesaikan akar masalah. Korupsi dan inefisiensi memperburuk situasi, sehingga masyarakat Papua tetap merasa terpinggirkan di tanah mereka sendiri. Eksklusi sosial yang dialami masyarakat Papua bertentangan dengan prinsip inklusi dalam politik multikultural. Negara memiliki tanggung jawab memastikan pembangunan tidak meminggirkan komunitas lokal.

Pengakuan Identitas Lokal. Meskipun pemerintah telah memberikan status otonomi khusus kepada Papua, pelaksanaannya sering kali tidak mencerminkan penghormatan penuh terhadap identitas lokal. Pendidikan, agama, dan adat istiadat Papua sering kali tidak terakomodasi dalam kebijakan nasional. Dalam kehidupan birokrasi atau pemerintahan, posisi-posisi penting sering kali diberikan kepada orang luar atau pendatang, dengan alasan bahwa masyarakat Papua dianggap belum mampu untuk mengisinya. Orang Papua yang ingin menduduki suatu posisi dihadapkan pada persyaratan yang berat, sementara pendatang tidak dikenakan hal yang sama. Di pasar-pasar tradisional Papua, pendatang sering kali memanfaatkan fasilitas utama, sementara orang asli Papua terpaksa berjualan di pinggir-pinggir atau di emperan pasar. Politik multikultural menekankan pentingnya pengakuan identitas lokal sebagai bagian dari keberagaman nasional. Pendidikan dan kebijakan lainnya harus mencerminkan nilai-nilai lokal Papua agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Keberagaman. Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengakomodasi keberagaman lokal (Mohammad A. 2011). Namun, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya transparansi, minimnya partisipasi masyarakat, dan pengelolaan yang kurang efektif. Politik multikultural mengharuskan kebijakan negara untuk bersifat inklusif, adil, dan partisipatif (Untung. 2019). Untuk itu, implementasi Otsus harus ditingkatkan agar dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam memperkuat kapasitas lokal, dan bukan sekadar sebagai kebijakan simbolis semata. Berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pasca berlakunya UU Otonomi Khusus, seperti pembentukan Desk Papua di setiap kementerian, pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), serta peningkatan anggaran untuk infrastruktur, masih dianggap sebagai kebijakan yang bersifat top-down. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai sebagai keputusan yang datang dari Pemerintah Pusat tanpa memperhatikan kebutuhan riil masyarakat Papua (Sugandi, 2008).

Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan publik saat ini, sebuah model kebijakan demokratis dapat diajukan. Model ini mengedepankan pentingnya pengambilan keputusan yang melibatkan sebanyak mungkin suara dari berbagai stakeholders. Namun,

dalam kenyataannya, Pemerintah Pusat, khususnya pihak eksekutif, cenderung mengeluarkan kebijakan yang kurang memperhatikan aspirasi masyarakat Papua. Hal ini terlihat dari rekomendasi kebijakan yang hanya berfokus pada peningkatan anggaran infrastruktur. Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi tidak efektif karena selama ini pengelolaan anggaran infrastruktur dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Balai dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang seringkali tidak memahami kebutuhan masyarakat Papua. Lembaga-lembaga tersebut juga dianggap menghambat dan membatasi kewenangan kepala daerah dalam mengelola wilayahnya. Akibatnya, implementasi kebijakan seperti ini diprediksi akan kurang mendapat dukungan dari masyarakat dan kepala daerah, yang dapat mempengaruhi keberhasilannya.

Konflik antara Prinsip Nasional dan Otonomi Lokal. Ketegangan antara nilai-nilai nasional dan lokal sering kali menjadi sumber konflik di Papua. Kebijakan nasional yang memprioritaskan investasi sering kali bertentangan dengan kebutuhan pelestarian budaya dan lingkungan lokal. Tim Studi Papua dari Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Sipil Indonesia (YAPPIKA) mengidentifikasi setidaknya tiga faktor utama yang mendasari tuntutan kemerdekaan masyarakat Papua, yaitu faktor sejarah, faktor identitas dan nasionalisme Papua, serta faktor ketidakadilan. Adapun dalam hal ketidakadilan, beberapa sub-faktor yang mendukungnya antara lain eksploitasi sumber daya alam Papua, rendahnya partisipasi publik, dominasi pendatang, penindasan budaya, dan kekerasan yang dilakukan oleh militer. Politik multikultural mengakui pentingnya harmoni antara otonomi lokal dan prinsip nasional. Kebijakan pembangunan harus selaras dengan kebutuhan lokal tanpa mengorbankan nilai budaya masyarakat adat.

D. Penutup

Polemik pembangunan di Papua mencerminkan tantangan dalam mengelola keberagaman dalam kerangka negara kesatuan. Dominasi identitas mayoritas, eksklusif sosial, dan kurangnya pengakuan identitas lokal menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan saat ini masih jauh dari inklusif. Politik multikultural menawarkan solusi dengan menekankan pentingnya pengakuan, inklusi, dan dialog konstruktif dalam proses pembangunan. Pemerintah perlu meningkatkan implementasi Otsus Papua dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dan memastikan kebijakan pembangunan menghormati nilai-nilai budaya setempat. Pendidikan multikultural juga harus diperkuat untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keberagaman. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, Papua dapat menjadi contoh bagaimana keberagaman budaya dapat dikelola untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan bersama.

Daftar Pustaka

- Boy Anugerah. 2019. *Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi*. Jurnal Kajian Lemhannas RI. Hal. 1-15.
- Dahl, Robert A. 1985. *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol* (Terjemahan oleh Sahat Simamora). Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadi, Syamsul & Widjajanto, Andi, dkk. 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional*. Jakarta: CIREs FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia (YOI).
- Musa'ad, Mohammad A. 2011. *Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan*. Jurnal Kajian Vol. 16 No. 2 Juni 2011. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Suropati, Untung. 2019. *Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik*

- Papua Secara Damai, Adil, dan Bermartabat*. Jakarta: Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Edisi Maret 2019.
- YAPPIKA. 2001. *Akar Permasalahan dan Alternatif Proses Penyelesaian Konflik: Aceh, Jakarta, Papua*. Jakarta: YAPPIKA.
- Yulia Sugandi. 2008. *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Fedrich Ebert Stiftung. Hal. 1-30.